

Peran *Stakeholder* dalam Pengendalian Lahan di Sub-DAS Citarik Hulu Kawasan Cekungan Bandung

Nida Nabilah Faza*, Nia Kurniasari

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nidanblhfaza@gmail.com, niawitaresna@gmail.com

Abstract. Problems around the Upper Citarik Sub-watershed are caused by the conversion of land from agricultural land so that people open agricultural land around the upstream. This increases the erosion hazard, causing flooding during the rainy season and drought during the dry season. The purpose of this study was to examine the relationship between actors in land tenure in the Upper Citarik Sub-watershed in the Bandung Basin Region. The MACTOR analysis method is an analysis of the strengths between actors or stakeholders by looking for agreements and differences in problems and goals to be achieved. In this research technique used to determine respondents using a purposive sample, so that a sample of respondents whose representatives can be mapped from Stakeholders, namely BBWS Citarum, Public Works Office for Spatial Planning for Bandung Regency, Public Works Office for Spatial Planning for Sumedang Regency, Bappeda for Bandung Regency, Bappeda for Sumedang Regency, Bappeda for West Java Province, community leaders and academics. The sub-watershed has an area of 4,315.41 hectares which are located in five villages, namely Dampit Village, Tanjungwangi Village, Cimanggu Village, Sindulang Village and Tegalmanggung Village. MACTOR analysis results show that the most important actor is Bappeda Kab. Bandung, BBWS Citarum and Bappeda Kab. Sumedang.

Keywords: *Land Function Transfer, Upstream Citarik Sub-watershed, MACTOR.*

Abstrak. Permasalahan di sekitar Sub-DAS Citarik Hulu disebabkan oleh alih fungsi lahan dari lahan pertanian sehingga masyarakat membuka lahan pertanian di sekitar hulu. Hal ini meningkatkan bahaya erosi, menyebabkan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Tujuan dari penelitian ini yaitu memetakan hubungan antar aktor dalam pengendalian lahan di Sub-DAS Citarik Hulu Kawasan Cekungan Bandung. Metoda analisis MACTOR yang merupakan analisis kekuatan antar aktor atau Stakeholder dengan mencari kesamaan dan perbedaan pada permasalahan dan tujuan yang akan dicapai. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk penentuan responden menggunakan purposive sample, sehingga dapat diambil sampel responden yang dapat dipetakan perwakilannya dari Stakeholder yaitu BBWS Citarum, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Sumedang, Bappeda Kabupaten Bandung, Bappeda Kabupaten Sumedang, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tokoh Masyarakat dan Akademisi. Sub-DAS memiliki luas sebesar 4.315, 41 Ha, berada di lima desa yaitu Desa Dampit, Desa Tanjungwangi, Desa Cimanggu, Desa Sindulang, dan Desa Tegalmanggung. Hasil analisis MACTOR terpetakan bahwa aktor yang paling berperan yaitu Bappeda Kab. Bandung, BBWS Citarum dan Bappeda Kab. Sumedang.

Kata Kunci: *Alih Fungsi Lahan, Sub-DAS Citarik Hulu, MACTOR.*

A. Pendahuluan

Lahan merupakan aspek penting untuk kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini terutama manusia (1). Tekanan penduduk merupakan salah satu penyebab terjadinya alih fungsi lahan, tekanan penduduk tersebut dapat menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman, sarana prasarana, dan kebutuhan akan pangan yang berdampak terhadap alih fungsi lahan pertanian yang menyebabkan perluasan pertanian, kegiatan tersebut sering dilakukan sampai ke wilayah hulu yang berdampak pada fungsi DAS. Kawasan DAS harus dijaga kelestariannya terutama bagian hulu, karena jika ada kerusakan bagian hulu maka akan berpengaruh ke DAS bagian hilir (2).

Wilayah Sub Daerah Aliran Sungai Citarik Hulu termasuk pada bagian Daerah Aliran Sungai Citarum, secara administrasi daerah aliran sungai berada di dua wilayah kabupaten Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Sub daerah aliran sungai ini memiliki luas sebesar 4.315, 41 Ha, yang berada di lima desa yaitu Desa Dampit, Desa Tanjungwangi, Desa Cimanggu, Desa Sindulang, dan Desa Tegal Manggung (3).

Kegiatan ekonomi pada kawasan Sub-DAS Citarik Hulu yaitu pengelolaan sumberdaya alam atau masyarakat dominan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Kegiatan pertanian yang dilakukan di Sub-DAS Citarik bagian hulu sebagian besar daerah pertanian, produk pertanian yang utama pada wilayah Sub-DAS Citarik Hulu adalah kol, kentang, tomat, kacang merah dan ubi kayu yang menghasilkan produksi yang cukup baik dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi tetapi kepemilikan lahan petani terbatas, sehingga mendorong para petani untuk memperluas lahan pertanian tetapi kurang memperhatikan karakteristik dan kualitas lahan, sehingga cenderung mengarah pada degradasi lahan. Sebagian besar perluasan lahan pertanian merambah ke kawasan hutan sampai pada bukit-bukit dengan kemiringan lereng yang curam. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan karena tidak memperhatikan karakteristik fungsi lahan, jika hal tersebut terus dilakukan tanpa adanya pengendalian maka akan menambah laju erosi sehingga lapisan tanah menipis yang menyebabkan tanah menjadi kurang produktif bahkan tidak produktif dan memicu terjadinya lahan kritis (3).

Selain itu Sub-DAS Citarik Hulu secara luasan relatif kecil, tetapi hal wilayah ini secara administratif memiliki dua wilayah kabupaten yang berbeda yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Hal tersebut merupakan permasalahan yang tidak sederhana karena mengakibatkan sulitnya dalam menstrukturisasi partisipasi pemangku kepentingan antar wilayah dan sektor dalam pengelolaan Sub-DAS (4).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan adanya permasalahan dalam sulitnya menstrukturisasi pemangku kepentingan antar wilayah dan sektor dalam pengelolaan DAS sehingga dalam penelitian ini dapat muncul pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana pemetaan hubungan antar aktor dalam pengelolaan lahan di Sub-DAS Citarik Hulu di Kawasan Cekungan Bandung?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam memetakan hubungan antar aktor dalam pengelolaan lahan di Sub-DAS Citarik Hulu Kawasan Cekungan Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metoda teknik analisis MACTOR yang merupakan analisis kekuatan (relative strength) antaraktor atau dalam kata lain Stakeholder dengan mencari kesamaan dan perbedaan pada permasalahan dengan adanya tujuan yang ingin dicapai.

Dengan penelitian ini teknik yang digunakan untuk penentuan responden menggunakan purposive sample, sehingga dapat diambil sampel responden yang dapat dipetakan perwakilannya dari Stakeholder yaitu BBWS Citarum, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Sumedang, Bappeda Kabupaten Bandung, Bappeda Kabupaten Sumedang, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tokoh Masyarakat dan Akademisi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aktor dan Tujuan Strategis

Pada tahap pertama dalam analisis MACTOR yaitu dengan mengidentifikasi aktor dan menentukan tujuan strategis. Aktor yang teridentifikasi sebagai aktor yang berperan penting bagi pengendalian lahan kritis Sub-DAS Citarik Hulu didapatkan sebanyak 9 orang dengan mewakili kelompok aktor pada instansi pemerintahan dan masyarakat yang terlibat dalam sistem. Berikut ini daftar aktor dan tujuan strategis yang teridentifikasi dalam pengendalian lahan Sub-DAS Citarik Hulu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Aktor dan Tujuan Strategis

Daftar Aktor	Daftar Tujuan Strategis
BBWS Citarum (BBWSCTRM)	Pelaksanaan reboisasi di Kawasan lahan kritis pada Sub DAS Citarik Hulu (A1)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (BAPPEDAJB)	Pengelolaan pengendalian Kawasan lahan kritis di Sub DAS Citarik Hulu (A2)
DPRD Provinsi Jawa Barat (DPRDJABAR)	Pemahaman tentang kearifan lokal sunda tentang pelestarian lingkungan hidup (B1)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bandung (BAPPEDABDG)	Kesadaran masyarakat terhadap urgensi pelestarian lingkungan hidup melalui pelibatan masyarakat dalam upaya reboisasi (B2)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sumedang (BAPPEDASMD)	Penyuluhan tentang upaya pelestarian lingkungan hidup terhadap masyarakat (B3)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Bandung (DPUTRBDG)	Pemberdayaan perekonomian masyarakat di kawasan sub DAS oleh pemerintah (C1)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Sumedang (DPUTRSMD)	Pemberdayaan ekonomi pertanian untuk masyarakat lokal (C2)
Tokoh Masyarakat (TOMAS)	Peningkatan PAD bagi pemerintah daerah Kab. Bandung dan Kab. Sumedang (C3)
Akademisi (AKADEMISI)	Menerapkan kebijakan atau aturan terkait implementasi penanggulangan lahan kritis di Sub-DAS Citarik Hulu (D1)
	Adanya kerjasama antar pemerintah daerah (D2)

Matriks Input Data

Matriks input data merupakan suatu proses analisis yang dilakukan dengan cara menginput data dasar yang dibutuhkan. Dalam proses ini dilakukan matriks pengaruh langsung (MDI) dan Matriks posisi penilaian (2MAO).

Matrix of Direct Influences (MDI) dalam matriks ini berisikan data penilaian antar aktor dalam pengendalian lahan Sub-DAS Citarik Hulu yang digunakan pada proses analisis. Keterkaitan aktor pada matriks ini dilihat dari pengaruh aktor tersebut terhadap aktor lainnya baik dari segi prosedural, keberhasilan kerja, misi, ataupun eksistensi lembaga. Pengaruh dinilai dari 0 hingga 4 sesuai dengan pentingnya kemungkinan resiko yang dialami aktor:

- 0: Tidak ada pengaruh/ No influence
- 1: Operasi Prosedur/ Operating procedures
- 2: Proyek/ Project
- 3: Misi/ Missions
- 4: Keberadaan/ Existence

Tabel 2. Matriks Pengaruh Langsung Aktor terhadap Aktor

MDI	BBWSCTRM	BAPPEDAJB	DPRDJABAR	BAPPEDABD G	BAPPEDASM D	DPUTRBDG	DPUTRSMD	TOMAS	AKADEMISI
BBWSCTRM	0	4	3	3	3	4	3	0	4
BAPPEDAJB	1	0	4	1	1	4	4	3	2
DPRDJABAR	2	3	0	3	3	2	2	2	1
BAPPEDABD G	2	3	2	0	2	3	2	3	4
BAPPEDASM D	3	3	2	2	0	2	3	3	4
DPUTRBDG	2	2	2	2	2	0	3	2	4
DPUTRSMD	2	2	2	2	2	4	0	2	4
TOMAS	1	1	2	1	2	2	2	0	1
AKADEMISI	1	2	2	2	2	2	2	1	0

Matrix Of Valued Positions Actor X Objective (2MAO) dalam matriks ini berisikan informasi penilaian dari aktor dengan memberikan informasi mengenai setiap keterkaitan antar aktor dengan masing-masing tujuan. Pengisian matriks ini dengan menilai isu-isu penting terkait dalam pengendalian lahan Sub-DAS Citarik Hulu di Kawasan Cekungan Bandung bagi para aktor terkait. Matriks ini diperlukan untuk proses analisis selanjutnya.

Tabel 3. Matriks Posisi Penilaian Aktor Terhadap Tujuan

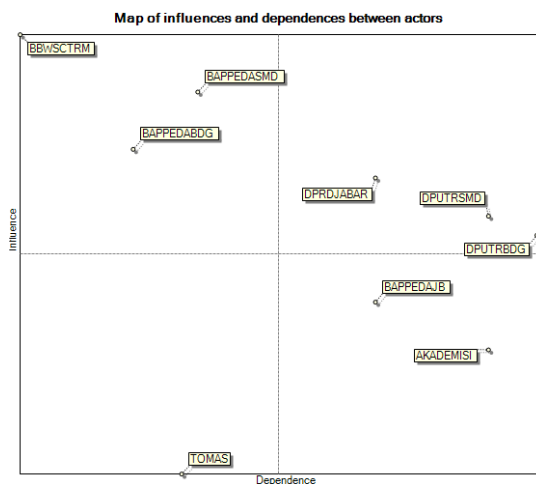
2MAO	A 1	A 2	B1	B2	B3	C 1	C 2	C 3	D 1	D 2
BBWSCTRM	-3	-2	-1	-2	-2	-2	-2	3	-3	-2
BAPPEDAJB	3	3	-1	-1	-2	-3	2	-1	-3	-2
DPRDJABAR	3	-1	2	-1	3	-2	2	-1	-3	-3
BAPPEDABDG	4	-2	3	-1	4	4	4	3	-4	-4
BAPPEDASMD	3	2	1	1	3	2	3	-4	3	3
DPUTRBDG	3	-2	3	4	1	-2	2	3	-2	-3
DPUTRSMD	2	-1	1	-1	-1	1	-1	2	1	3
TOMAS	3	3	3	2	2	3	2	4	1	4
AKADEMISI	3	-2	3	-1	-2	2	3	-1	-2	1

Matrix of Direct and Indirect Influences (MDII), Pada matriks ini berguna dalam mengetahui aktor yang paling memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung dalam pengendalian lahan. Adapun berguna juga untuk memberikan tingkat ketergantungan setiap aktor dalam pengendalian lahan Sub-DAS Citarik Hulu di Kawasan Cekungan Bandung. Tingkatan nilai dapat dilihat jika semakin tinggi nilai (Ii) dan (Di) maka sebesar juga pengaruhnya tersebut bagi aktor lainnya ataupun semakin bergantungnya terhadap aktor lainnya.

Tabel 4. Matriks Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

MDII	BBWSCTRM	BAPPEDAJB	DPRDJABAR	BAPPEDABDG	BAPPEDASMD	DPUTRBDG	DPUTRSMD	TOMAS	AKADEMISI	Ii
BBWSCTRM	13	19	17	15	15	20	19	16	20	141
BAPPEDAJB	11	13	15	13	14	17	16	12	15	113
DPRDJABAR	14	17	16	14	15	17	17	16	16	126
BAPPEDABDG	13	16	17	14	15	18	18	15	17	129
BAPPEDASMD	14	17	18	15	16	19	19	15	18	135
DPUTRBDG	13	15	16	14	15	17	17	13	17	120
DPUTRSMD	13	15	16	14	15	18	17	13	18	122
TOMAS	12	12	12	12	12	12	12	11	11	95
AKADEMISI	13	14	14	13	13	14	14	13	13	108
Di	103	125	125	110	114	135	132	113	132	1089

Pada hasil Tabel Analisis dapat dilihat bahwa nilai tertinggi dari aktor yang berpengaruh langsung dan tidak langsung dalam pengendalian lahan Sub-DAS Citarik Hulu di Kawasan Cekungan Bandung, untuk nilai yang memiliki pengaruh tidak langsung (Ii) yaitu BBWS Citarum yang mempunyai nilai (Ii) 141, dikarenakan BBWS Citarum mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang berperan pada perencanaan, pelaksanaan konstruksi, maupun operasi pada wilayah sekitar daerah aliran sungai. Selanjutnya Bappeda Kab. Sumedang mempunyai nilai (Ii) 135, dikarenakan Bappeda Kab. Sumedang mempunyai kewenangan daerah dan tugas pembantuan pada bidang Perencanaan, Penelitian serta Pengembangan Daerah sehingga berperan dalam pengendalian daerah aliran sungai. Adapun Bappeda Kab. Bandung mempunyai nilai (Ii) 129, dikarenakan mempunyai kewenangan dalam perumusan suatu kebijakan teknis perencanaan pembangunan, serta mengkoordinasikan penyusunan suatu perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas pada lingkup perencanaan pembangunan suatu daerah termasuk dalam pengendalian daerah aliran sungai. Sedangkan untuk nilai yang memiliki pengaruh langsung yaitu dapat dilihat dari nilai tertinggi yaitu DPUTR Kab. Bandung yang mempunyai nilai (Di) 135, dikarenakan mempunyai tugas langsung pada perencanaan daerah sehingga dapat berperan langsung dalam pengendalian lahan Sub-DAS Citarik Hulu.

**Gambar 1.** Peta Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung antar Aktor

Pada kuadran I menunjukkan tingkat kekuasaan yang dimiliki Stakeholder terhadap adanya pengendalian lahan sehingga dari Gambar 1. Peta Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung antar Aktor. Bahwa BBWS Citarum, Bappeda Kab. Bandung dan Bappeda Kab. Sumedang merupakan aktor yang paling dominan. Dimana peran BBWS Citarum ini meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, maupun operasi pada wilayah sekitar daerah aliran sungai. Serta peran Bappeda Kab. Sumedang dan Bappeda Kab. Bandung ini meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan suatu daerah termasuk sekitar daerah aliran sungai.

Kuadran II ini merupakan Relay aktor yaitu berperan dalam eksekusi keputusan pada lapangan yang difungsikan untuk antisipasi. Aktor yang termasuk pada kuadran II yaitu DPRD Provinsi Jawa Barat, DPUTR Kab. Bandung dan Kab. Sumedang. Aktor-aktor ini berperan untuk mendukung dalam pengendalian dan mendukung secara langsung dan berperan dalam proses penganggaran dalam keberhasilan sesuai kapasitas masing-masing.

Kuadran III ini merupakan Dependence Stakeholder yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap aktor lain dalam pengendalian. Aktor yang termasuk dalam kuadran III ini yaitu Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Akademisi. Berdasarkan hasil wawancara pada Bappeda Provinsi Jawa Barat didapatkan bahwa aktor tersebut tidak berperan secara penuh dalam penanganan lahan kritis yang secara langsung. Untuk akademisi tidak sepenuhnya berpartisipasi secara langsung dalam penanganan pengendalian lahan tetapi hanya membantu dalam segi merumuskan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan daerah.

Kuadran IV merupakan Antonomus Stakeholder yaitu memiliki pengaruh yang lemah dan ketergantungan yang sedikit terhadap faktor lainnya. Dengan aktor dalam kuadran ini yaitu Tokoh Masyarakat. Pada hasil wawancara dengan tokoh masyarakat diketahui bahwa aktor ini kurang terlibat dalam pengendalian lahan tetapi memiliki peran dalam membantu proses pengendalian lahan.

Tabel 5. Kuadran Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung antar Aktor

Kuadran I Influence Stakeholder	Kuadran II Relay Stakeholder	Kuadran III Depedence Stakeholder	Kuadran IV Antonomus Stakeholder
BBWS Citarum	DPRD Provinsi	Bapedda Provinsi Jawa Barat	Tokoh Masyarakat
Bappeda Kab. Bandung	DPUTR Kab. Bandung	Akademisi	
BappedaKab.Sumedang	DPUTR Kab. Sumedang		

Pada data matriks pengaruh dan tidak pengaruh dapat digunakan untuk menentukan keseimbangan dari kekuatan antar aktor. Pada hasil matriks di atas sangat dibutuhkan dikarenakan menghitung keseimbangan kekuatan antar aktor bergantung kepada posisi setiap aktor.

Tabel 6. Skala Bersih Pengaruh

NS	BBWSC TRM	BAPPEDA JB	DPRD JABAR	BAPPEDA BANDUNG	BAPPEDA SUMEDANG	DPUTR BANDUNG	DPUTR SUMEDANG	TOMAS	AKADEMISI	Sum
BBWSC TRM		8	3	2	1	7	6	4	7	38
BAPPE DAJB	-8		-2	-3	-3	2	1	0	1	-12
DPRDJ		2				1	1	4	2	

NS	BBWSCTRM	BAPPEDAJB	DPRDJABAR	BAPPEDABDG	BAPPEDASMD	DPUTRBDG	DPUTRSMD	TOMAS	AKADEMISI	Sum
ABAR	-3			-3	3					1
BAPPE DABDG	-2	3	3		0	4	4	3	4	19
BAPPE DASMD	-1	3	3	0		4	4	3	5	21
DPUTR BDG	-7	-2	-1	-4	-4		-1	1	3	-15
DPUTR SMD	-6	-1	-1	-4	-4	1		1	4	-10
TOMAS	-4	0	-4	-3	-3	-1	1		-2	-18
AKADE MISI	-7	-1	-2	-4	-5	-3	4	2		-24

Dalam hasil analisis di atas merupakan skala pengaruh bersih yang dapat diketahui dari aktor i yang memberikan pengaruh lebih terhadap aktor j. Adapun contohnya, bahwa BBWS Citarum memberikan pengaruh lebih daripada yang diterimanya kepada Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian lahan Sub-DAS Citarik Hulu. Sedangkan DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan pengaruh yang kurang daripada yang diterimanya kepada Bappeda Kab. Bandung dalam pengendalian lahan Sub-DAS Citarik Hulu.

Setelah memperhitungkan koefisien balance of power (R_i) di atas dapat diketahui Matriks posisi bernilai tertimbang (3MAO). Matriks posisi bernilai tertimbang (3MAO) ini dihitung menggunakan data yang terdapat pada matriks posisi penilaian (2MAO) dan koefisien keseimbangan kekuatan aktor/balance of power (R_i). Dengan matriks posisi bernilai tertimbang (3MAO) dapat dihasilkan pula koefisien mobilisasi atau reaksi suatu aktor terhadap suatu tujuan serta tingkat ketersetujuan dan ketidaksetujuan atas suatu tujuan tersebut. Hal tersebut ditunjukkan pada kolom “mobilisation” yaitu urutan nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah menunjukkan aktor yang paling berpengaruh sampai aktor yang kurang berpengaruh. Sedangkan urutan tujuan yang paling utama ditunjukkan pada baris “degree of mobilisation”.

Tabel 7. Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MAO) dalam Pengendalian lahan Sub-DAS Citarik Hulu di Kawasan Cekungan Bandung

MAO	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	obili
BBWSCTM	4,1	-2,8	-1,4	2,8	2,8	2,8	2,8	,1	4,1	2,8	0,3
BAPPEDAB	2,7	2,7	0,9	0,9	1,8	2,7	,8	0,9	2,7	1,8	8,6
DPRDJABR	3,1	-1,0	,1	1,0	,1	2,1	,1	1,0	3,1	3,1	1,6
BAPPEDAG	4,6	-2,3	,5	1,2	,6	,6	,6	,5	4,6	4,6	8,1
BAPPEDAD	3,6	2,4	,2	,2	,6	,4	,6	4,8	,6	,6	0,0
DPUTRBDG	2,7	-1,8	,7	,6	,9	1,8	,8	,7	1,8	2,7	2,6
DPUTRSMD	1,9	-0,9	,9	0,9	0,9	,9	0,9	,9	,9	,8	3,1

MAO	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	obil
TOMAS	2,1	2,1	,1	,4	,4	,1	,4	,9	,7	,9	9,3
AKADEM II	2,4	-1,6	,4	0,8	1,6	,6	,4	0,8	1,6	,8	5,9
Number of agreements	23,1	7,2	4,9	,2	3,6	1,7	7,7	5,0	,3	0,1	
Number of disagreements	-4,1	-10,4	2,3	7,6	7,1	9,3	3,7	7,5	17,9	14,9	
Degree of mobilization	27,2	17,6	7,2	3,8	0,7	1,0	1,4	2,6	3,1	5,0	

Adapun histogram ini merupakan hasil dari matriks posisi bernilai tertimbang (3MAO). Pada kolom “mobilisasi”, yaitu merupakan aktor yang paling berpengaruh ditunjukkan sebelum aktor yang paling kurang berpengaruh, dapat dilihat dari nilai terbesar sampai nilai terendah.

Tabel 8. Peringkatan mobilisasi antara aktor terhadap tujuan

Aktor	Mobilisasi	Peringkat
Bappeda Kab. Bandung	38,1	1
BBWS Citarum	30,3	2
Bappeda Kab. Sumedang	30,0	3
Dinas PUTR Kab. Bandung	22,6	4
DPRD Pov. Jawa Barat	21,6	5
Tokoh Masyarakat	19,3	6
Bappeda Prov. Jawa Barat	18,6	7
Akademisi	15,9	8
Dinas PUTR Kab. Sumedang	13,1	9

Pada urutan peringkat diatas dapat dilihat bahwa aktor dengan memiliki mobilisasi yang paling tinggi dalam menangani pengendalian lahan Sub-DAS Citarik Hulu adalah Bappeda Kab. Bandung sebesar 38,1, BBWS Citarum sebesar 30,3 dan Bappeda Kab. Sumedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga Lembaga tersebut memiliki dukungan dan berkontribusi besar dalam implementasi pengendalian lahan Sub-DAS Citarik Hulu. Selanjutnya hasil skala prioritas tujuan berdasarkan peningkatan nilai mobilisasi penilaian aktor dapat dilihat pada Tabel 5.20 Skala prioritas tujuan berdasarkan peningkatan nilai mobilisasi penilaian aktor sebagai berikut.

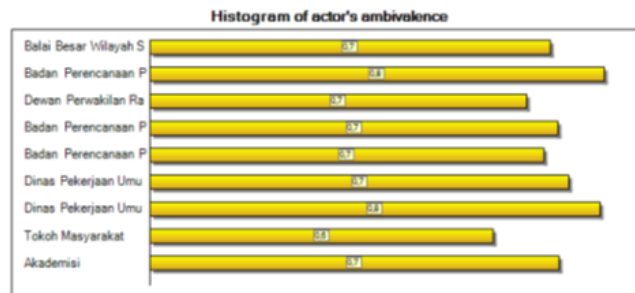
Tabel 9. Skala prioritas tujuan berdasarkan peningkatan nilai mobilisasi penilaian aktor

Kode	Tujuan	Tingkat Mobilisasi	Peringkat
A1	Pelaksanaan reboisasi di Kawasan lahan kritis pada Sub-DAS Citarik Hulu	27,2	1
D2	Adanya Kerjasama antar pemerintah daerah	25,0	2
D1	Menerapkan kebijakan atau aturan terkait implementasi lahan kritis	23,1	3

Kode	Tujuan	Tingkat Mobilisasi	Peringkat
C3	Peningkatan PAD dari sektor pertanian bagi pemerintah daerah Kab. Bandung dan Kab. Sumedang	22,6	4
C2	Pemberdayaan ekonomi pertanian untuk masyarakat lokal	21,4	5
C1	Pemberdayaan perekonomian masyarakat dikawasan Sub-DAS citarik Hulu oleh pemerintah	21,0	6
B3	Penyuluhan tentang upaya pelestarian lingkungan hidup terhadap masyarakat	20,7	7
A2	Pengendalian kawasan lahan kritis di Sub DAS	17,6	8
B1	Pemahaman tentang kearifan lokal sunda tentang pelestarian lingkungan hidup	17,2	9
B2	Kesadaran masyarakat terhadap urgensi pelestarian lingkungan hidup melalui pelibatan masyarakat dalam upaya reboisasi	13,8	10

Pada hasil skala prioritas tujuan berdasarkan mobilisasi aktor ini dapat dikatakan berhasil jika variabel ketergantungan langsung ini dapat dikelola secara benar. Terjadinya peningkatan lahan kritis pada Sub-DAS Citarik Hulu dengan nilai 27,2, Kurangnya kerjasama antar pemerintah daerah dengan nilai 25,0, dan Kurangnya implementasi kebijakan dalam penanggulangan lahan kritis di Sub-DAS Citarik Hulu dengan nilai 23,1. Dari adanya nilai ini menjadi prioritas dalam pengendalian lahan Sub-DAS Citarik Hulu di Kawasan Cekungan Bandung.

Actors Ambivalence merupakan Aktor yang konvergen untuk satu tujuan yang sama tetapi tidak pada tujuan lainnya disebut aktor ambivalensi. Berdasarkan hasil analisis aktor ambivalensi yang dapat dilihat pada Gambar 5.29 para aktor yang terdapat pada lingkungan pengendalian lahan Sub-DAS Citarik Hulu mempunyai tingkat ambivalensi terendah senilai 0,6 sampai dengan nilai tertinggi senilai 0,8. Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Dinas PUTR Kabupaten Sumedang mempunyai tingkat ambivalensi yang tertinggi. Berdasarkan hasil dilapangan menyebutkan bahwa dinas ini berpendapat bahwa tidak mempunyai hubungan yang erat dengan permasalahan yang ada, tujuan strategis maupun dalam pengendalian lahan.



Gambar 2. Nilai Ambivalen antar Aktor dalam Pengendalian lahan Sub-DAS Citarik Hulu di Kawasan Cekungan Bandung

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis MACTOR yang terdiri dari 9 aktor yang berperan dalam pengendalian lahan, terpetakan bahwa stakeholder yang paling berperan dalam pengendalian lahan Sub-DAS Citarik Hulu yaitu Bappeda Kab. Bandung, BBWS Citarum dan Bappeda Kab. Sumedang dengan ketiga aktor tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan sehingga dapat berpengaruh dalam pengendalian lahan. (Pramadhika & Syaodih, 2022; Sopian & Fardani, 2023; Wijayakusuma, 2023)

Acknowledge

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Nia Kurniasari, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan arahan dan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Pramadhika, M. E., & Syaodih, E. (2022). Kajian Kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam Mendukung Pembangunan Rendah Karbon. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 139–146. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v2i2.1318>
- [2] Sopian, F. A. R., & Fardani, I. (2023). Pengembangan Geodatabase Status Kepemilikan Lahan Permukiman Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 75–82. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v3i1.1994>
- [3] Wijayakusuma, B. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Daerah Resapan Air Kecamatan Cimenyan. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 29–38. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v3i1.1929>
- [4] L. A. Ramayanti, B. Yuwono, and M. Awaluddin, “Pemetaan Tingkat Lahan Kritis dengan Menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi (Studi Kasus : Kabupaten Blora),” *Jurnal Geodesi Undip*, vol. 4, no. 2, pp. 200–207, 2015.
- [5] H. Satriawan, “Alih Fungsi Lahan Kawasan Hulu dan Dampaknya Terhadap Kualitas Air di Kawasan Hilir Daerah Aliran Sungai,” vol. 10, no. 2, pp. 54–58, Nov. 2010.
- [6] W. Kastolani, “Degradasi Lahan Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Citarik Hulu di Kab.Bandung dan Sumedang,” *Jurnal Geografi*, vol. 9, no. 2, 2009.
- [7] Zumrodi, “Strategi Kebijakan Pengelolaan Sub DAS Citarik (Sungai Citarum Hulu),” 2016.